

IMF adalah mengurus krisis hutang internasional yang mulai bermunculan di berbagai negara peminjim. Sebagaimana hutang di negara-negara Dunia Ketiga membengkak dan tampaknya akan tak terbayar, sesuatu yang akan membuat sistem ekonomi internasional tersebut kembali kolaps, baik IMF maupun Bank Dunia mulai menawarkan pinjaman baru dengan syarat negara-negara penghutang tersebut setuju dengan program-program struk-tural di bawah koordinasi korporasi-korporasi internasional yang mereka dukung. Program yang ditawarkan itu pada intinya untuk "mempermurah ongkos produksi bagi korporasi-korporasi internasional" tersebut (David Ranney, *The Evolving Supra-National Policy Arena*, University of Illinois Chicago 1993, hlm 24) dengan cara:

- Mereduksi pengeluaran pemerintah, untuk mengontrol inflasi dan mereduksi tuntutan aliran kapital dari luar; se-buah langkah yang dalam prakteknya diterjemahkan ke dalam pemotongan pengeluaran di bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan;
- Pemotongan upah atau menekan kenaikannya dengan keras demi mereduksi inflasi dan membuat ekspor lebih kompetitif;
- Liberalisasi impor untuk membuat industri lokal lebih efisien dan memberlakukan insentif bagi produksi yang berwawasan pasar ekspor, yang dapat dilihat baik sebagai sebuah sumber daya yang sangat dibutuhkan oleh pasar luar negeri dan juga sebuah sumber daya pertumbuhan ekonomi yang lebih dinamis daripada sekedar pasar lokal;
- Menghilangkan batasan-batasan investasi luar negeri dalam bidang industri dan layanan finansial untuk membuat produksi lokal dan layanan pengantarannya lebih efisien, atas kehadiran kompetitor dari luar negeri;
- Menurunkan nilai suku bunga lokal yang berbanding dengan dolar demi membuat ekspor lebih kompetitif; dan
- Memprivatisasi perusahaan-perusahaan milik negara dan memulai penghapusan aturan-aturan secara radikal demi mempromosikan alokasi sumber-sumber daya sesuai aturan pasar bukan lagi oleh aturan pemerintah. (Walden

reportase kronologis KASUS TANAH RUMPIN, BOGOR

8 September 2005 | TNI AU mendarangi tanah kavling warga lalu merusak patok batas tanah dan memasang plang yang bertuliskan bahwa tanah tersebut adalah milik mereka berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang (SP KSAP) No. 23/P/KSAP/50. Oktober 2006, TNI AU yang diwakili oleh Kol. Dery Pemba Syafar mulai membujuk warga melalui Ketua RT setempat, H. Amir, agar menjual tanah mereka yang berada di blok Cisauk Persil 20 seluas 10 Ha seharga Rp 7000/meter. Saat itu warga tetap menolak untuk menjualnya. Namun menurut pihak TNI AU, tanah tersebut adalah bagian dari tanah 1000 Ha yang diklaim sebagai milik mereka berdasarkan SP SKAP No. 23/P/KSAP/50 dan Surat Keputusan Bupati Bogor: 591/194/Kpts/Huk/2003.

8 November 2006 | TNI AU dilengkapi senjata laras panjang mulai menduduki lokasi persawahan milik warga. Dengan membawa Beko dan alat berat lainnya, mereka mulai menggali lahan persawahan yang terbelah masih sangat produktif tersebut. Aksi tersebut memancing reaksi warga.

9 November 2006 | Sekitar 250 warga melakukan demonstrasi di lokasi penggalian. Aksi warga disaksikan oleh Kepala Desa, Ketua BPD, Camat, Koramil dan Kapolsek. Dalam aksinya, warga meminta TNI AU untuk segera meninggalkan lokasi tersebut. Tetapi demonstrasi warga tidak berlangsung lama karena helikopter milik TNI AU yang sengaja terbang rendah memaksa mereka untuk bubar.

10 Desember 2006 | Lima hari setelah melakukan unjuk rasa ke DPRD Bogor, warga kembali melakukan aksi demonstrasi di jalan raya Cisauk-Cicangkal. Setelah itu mereka mendarangi lokasi persawahan yang digali TNI AU. Areal yang digali tersebut luasnya mencapai 2 Ha dengan kedalaman 2 meter. Keesokan harinya pada tanggal 11, diadakan pertemuan antara warga desa Sukamulya dengan Komisi A DPRD Kab. Bogor. Warga meminta TNI AU untuk segera menghentikan penggalian areal persawahan milik warga, namun pihak TNI AU bersikeras akan terus melakukan penggalian sampai ada perintah untuk menghentikan penggalian tersebut dari Komandan Pusat (Dephan dan KASAU). Semenjak itu sering terjadi intimidasi yang dilakukan oleh TNI AU dan penjagaan yang ketat lengkap dengan senjata laras panjang di sekitar lokasi.

Bello, *Dark Victory*, Oakland, Calif. Food First 1994, hlm 27)

Kebanyakan pemerintah negara-negara Dunia Ketiga tak mempunyai pilihan lain kecuali menerima setiap syarat yang diajukan demi mendapatkan kucuran hutang baru, termasuk Indonesia, di mana pada bulan Januari 1998 Suharto menandatangani perjanjian dengan IMF. Siapa pun yang duduk dalam jajaran pemerintahan—entah ia dipilih secara demokratis atau tidak—selama negara masih terjatuh dalam lilitan hutang, maka ia harus mengikuti aturan dan perjanjian ekonomi yang telah disepakati sebelumnya.

Pemerintahan Global Baru—Trinitas Suci Baru

Globalisasi telah sejak awal membawa kontradiksi-kontradiksinya sendiri yang ditandai oleh konsep negara-bangsa yang dicetuskan oleh Ernest Renan tahun 1890-an. Bahkan negara kesejahteraan nasional yang demokratis dan teratur pun tak pernah menyentuh realitas bahwa ada saling keterkaitan antar setiap negara, yang artinya tak ada negara yang benar-benar berdiri sendiri tanpa jalinan ekonomi dengan negara lainnya. Teori-teori nasionalis juga tidak menyentuh realita bahwa dunia tidaklah merupakan sekedar sekumpulan orang-orang yang hidup terpisah dengan orang lainnya dan bahwa sesungguhnya yang ada sejak awal adalah negara yang kuat mendominasi yang lemah—setiap negara terlalu bergantung pada negara lain, termasuk negara-negara adidaya, untuk dapat benar-benar menentukan apa yang harus berlaku di daerahnya masing-masing. Pasar dan bisnis beroperasi secara inter-nasional dan tidak selalu sejalan dengan kepentingan "negara mereka" beserta seluruh rakyatnya.

Pemerintahan-pemerintahan nasional telah memberikan kekuatannya pada "Trinitas Suci Baru"—IMF, Bank Dunia dan GATT/WTO. Agensi-agensi ini semakin menentukan semua aturan yang harus diberlakukan dalam setiap negara, tentang bagaimana mereka akan beroperasi dan berkooperasi demi tujuan yang satu: Agenda Korporasi.

Tapi justru tidak melenyapkan pemerintah-pemerintah nasional, sistem ekonomi global baru ini membutuhkan peme-

Tanah Rumpin adalah lahan pertanian yang produktif. Tanah yang telah dikelola oleh warga Sukamulya secara turun-temurun ini memiliki sejarah kepemilikan yang panjang semenjak penjajahan Belanda hingga Jepang. Semenjak tahun 1955–1956 tanah ini diklaim sebagai milik TNI AU. Pada tahun 1976, BPN Bogor memberikan status Girik pada tanah tersebut, namun warga belum mampu merubahnya menjadi Surat Hak Milik (Sertifikat). Pada tahun 1991 TNI AU membuat pernyataan bahwa mereka adalah pemilik tanah seluas 1000 Ha tersebut. Sampai pada akhirnya tahun 2006 aksi pengklaiman kembali dilancarkan oleh pihak TNI AU.



rintah nasional atau/dan bahkan juga lokal untuk menerapkan aturan-aturan yang sesuai dengan kondisi nasional/lokal masing-masing demi meningkatkan efektifitas kerja sistem ekonomi global itu sendiri.

Sebagaimana negara-negara di era pra-modern Eropa yang menandai semakin berkuasanya kelas kapitalis nasional, sistem ekonomi global ini melayani sekaligus didukung oleh semakin maraknya korporasi-korporasi multinasional/ transnasional (MNC/TNC). Sebagaimana juga kekuasaan monarki, Trinitas Suci Baru tersebut juga paham bahwa mereka hanya akan dapat terus berkuasa apabila membangun aliansi dengan kelas penguasa di setiap inchi daerah di mana mereka beroperasi. Tetapi fungsi mereka justru lebih sedikit dibandingkan dengan fungsi pemerintahan konvensional—berhubung peran mereka yang nyaris tak nampak—yaitu hanya berfungsi dan tunduk pada Agenda Korporasi. Apabila dahulu raja adalah pengejawantahan Tuhan di atas bumi, maka kini tuhan-nya adalah Agenda Korporasi itu sendiri. Suka atau tidak, diakui atau tidak, hidup kita dan hidup anak-anak kita kini ada di bawah kekuasaannya.

* * *

bagai provokator. Beberapa orang yang diculik, diinterogasi, dan disiksa kemudian diserahkan ke Polsek Rumpin tanpa tuduhan yang jelas.



JURNAL APOKALIPS
PO Box 1419, Bandung 40014
email: tim.apokalips@gmail.com

TIM REDAKSI: Sumadikarta, Makhдум Ibrahim, Rikki Rikardo, Bambang Sutedjo, Munaa, Petrus Sumitro, Ari Wibowo, Ahmad Kosasih

Jurnal Apokalips diterbitkan berkala sebagai bagian dari agenda Kampanye Komunitas Melawan Neoliberalisme. Kampanye ini terlaksana atas inisiatif dari komunitas-komunitas independen sebagai ikhtiar melawan gelombang imperialisme gaya baru yang semakin hari semakin nyata dan terasa dampaknya. Sesuatu yang membuat nyaris segala sesuatu dilabeli harga tetapi semakin sedikit yang diberi arti. Gerai-gerai produk semakin berbetbaran di mana pun, tetapi di mana pun juga semakin sedikit yang mampu mengaksessnya. Hidup jadi tak lebih dari sekedar menjadi urusan makan, minum, berkembang biak atau urusan tempat tinggal dan dekorasinya; menjadi urusan konsumsi tapi tidak urusan kreasi. Hidup telah kehilangan artinya. Kami hanya menginginkan hidup kembali menjadi layak untuk dijalani, di mana segala sesuatu diberi arti bukan lagi label harga, sebagaimana kami ingin membangun kembali kerajaan surga di atas puing-puing neraka bumi bersama kalian semua, hingga suatu masa, hidup akan berkembang kembali di hadapan kita seperti mawar di awal musim panas.

JURNAL APOKALIPS

Dalam dunia saat ini, mata kita hanya mengenali apapun sebagai produk dan melihat harga yang tertera di atasnya.

GRATIS SEPERTI CIUMAN PERTAMA

EDITORIAL

Indonesia dilanda krisis finansial dahsyat yang berlanjut hingga kini semenjak tahun 1997—yang sesungguhnya adalah akibat merosotnya nilai rupiah yang disebabkan karena para pengusaha bank swasta Indonesia tak mampu mengembalikan hutang-hutang mereka yang pada tahun tersebut telah jatuh tempo—membuat Suharto pada bulan Januari 1998 menandatangani *Letter Of Intent* (LOI) dengan Managing Director IMF, Michael Camdessus. Dan sejak itu jugalah, maka Indonesia mulai mengoperasikan apapun yang dikatakan IMF atas nama restrukturisasi Indonesia (i.e. pemotongan subsidi publik, pembukaan keran impor, privatisasi, dll.). Tapi toh ketergantungan pada konsep ekonomi tipe ini bukanlah pertama kalinya, dan apa yang terjadi sekarang hanyalah sebuah konsekuensi logis dari apa yang terjadi sebelumnya. Pra-IMF, pemerintah Indonesia bukanlah Suharto, melainkan korporasi bankir Warburg & Co., Lehman Brothers dan Lazard Freres—tiga serangkai yang mempraksai pembentukan IGGI (InterGovernmental Group on Indonesia) atau grup intra-pemerintah yang tentunya memerintah Indonesia. Suharto hanyalah alat. Dan ia dibuang saat gaya-gaya bermainnya dianggap kuno dan tak efektif lagi. Pasca lengsernya sang diktator, kursi pemerintahan silih berganti diisi oleh berbagai kandidat dari berbagai partai politik yang menawarkan berbagai gaya main baru, tapi toh semuanya hanyalah alat di tengah lapangan permainan yang sama. Konsep ekonomi, cengkeraman hutang, semuanya tetap mengarah pada satu hal yang sama; dari COMECON di era Sukarno, hingga IGGI di era Suharto, hingga kini pasca-IMF dan terlibatnya ADB yang entah sampai kapan, dan kesemuanya menegakan hal yang sama, bahwa semua pemerintah hanyalah alat yang mengabdikan pada satu tuhan: Agenda Korporasi.

Ilusi Pelunasan Hutang IMF

Kunjungan Managing Director IMF

Secara formal Indonesia telah lepas dari hutangnya terhadap IMF, namun bukan berarti Indonesia tidak lagi berhubungan dengan agenda pembangunan yang dicetuskan IMF 24 Januari 2007, Managing Director IMF, Rodrigo de Rato datang ke Jakarta. Kedatangan Rato ini adalah kedatangan pertama kalinya pejabat teras IMF ke Jakarta sejak pelunasan hutang Indonesia sebesar US\$ 7,5 Miliar pada Oktober 2006. Kedatangan Rato disambut berbagai spekulasi tentang maksud kunjungannya kali ini, terutama agenda apa yang hendak bicarakan bersama SBY. Selama keberadaannya di Indonesia, beberapa LSM berunjuk rasa di depan gedung perwakilan IMF di kompleks gedung Bank Indonesia, Jalan Budi Kemuliaan, Jakarta Pusat. Pengunjuk rasa membawa poster-poster yang bertuliskan "Build a new world without IMF", "Lawan penjajahan gaya baru: neoliberalisme", "IMF OUT", dan poster lain yang intinya menolak upaya intervensi IMF atas Indonesia. Unjuk rasa ini berkaitan dengan prediksi adanya agenda tersembunyi yang dibawa Rato ke Jakarta. Berbagai pihak menyatakan kekhawatirannya jika Indonesia kembali melakukan pinjaman kepada IMF.

Terkait kedatangan Rato ke Jakarta, beberapa pejabat di pemerintahan termasuk SBY memberikan pernyataannya. "Kunjungan Managing Director IMF Rodrigo de Rato ke Indonesia, janglah diartikan bahwa IMF akan menawarkan kembali bantuan pembiayaan pembangunan di Indonesia. Kita tidak berpikir atau merencanakan untuk berutang lagi pada IMF," kata SBY kepada wartawan usai menerima Rato. Sedangkan Menteri Perekonomian Boediono menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia dalam waktu dekat tidak akan mengajukan proposal pinjaman hutang lagi kepada IMF. "Tidak ada rencana atau keperluan untuk itu, kita baru saja membayar kembali. Di sini pun tidak dibahas, dan tidak ada dalam rencana pemerintah untuk itu. Ini adalah kunjungan kehormatan yang tidak ada agenda

husus. Intinya adalah bertemu untuk bertukar pikiran dan bertukar informasi menyangkut beberapa hal," kata Boediono. Secara keseluruhan pejabat pemerintah dalam pernyataannya menegaskan bahwa kunjungan Rato sama sekali tidak membawa agenda pemberian hutang baru. Walaupun begitu, tetap ada agenda yang berkaitan dengan pemberlakuan liberalisasi ekonomi di Indonesia. Untuk hal ini, IMF masih mempunyai tanggung jawab menuntaskan tujuan akhirnya melakukan liberalisasi ekonomi di seluruh dunia termasuk Indonesia. Apalagi Boediono sendiri pernah memberikan pernyataan bahwa pemerintah masih akan mendengar saran dan menerima bantuan teknis terkait kebijakan perekonomian dari IMF.

Selain pujian-pujian yang diutarakan Rodrigo de Rato kepada pemerintah atas keberhasilan menjalankan program IMF di Indonesia, dalam pertemuan itu pula dibicarakan beberapa hal terkait situasi Indonesia lainnya. Salah satunya ialah program yang dijalankan program IMF di Indonesia sejak tahun 2003 sampai sekarang. Seperti yang diterangkan oleh SBY kepada Rato, yaitu masalah *triple track strategy*, atau strategi tiga jalur yakni stabilitas ekonomi, pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan juga peningkatan lapangan kerja. Serta masalah mengenai peran dari UKM dan pertanian yang sangat penting di dalam strategi pembangunan Indonesia.

Berkaitan dengan program kemiskinan, nampaknya pemerintah Indonesia belum mampu menjalankan program pengurangan kemiskinan secara signifikan. Karena data BPS (Badan Pusat Statistik) menunjukkan bahwa pada 2004 persentase kemiskinan di Indonesia sekitar 16,7% atau sekitar 36 juta jiwa dengan rata-rata pendapatan perbulan sekitar Rp. 122.775. Walaupun tahun 2000 persentase kemiskinan di Indonesia mencapai 20.0 sehingga tahun 2004 menunjukkan penurunan, namun tahun 2006 diperkirakan mengalami kenaikan sekitar 0,6%. Indikasi naiknya kemiskinan bisa terlihat sekarang ini

terutama jika dikaitkan dengan menurunnya daya beli masyarakat. Meningkatnya urbanisasi ikut memberi andil pada naiknya angka kemiskinan. Pemerataan pembangunan dalam kenyataannya tidak berlaku demikian, karena dalam era otonomi ini perputaran uang di Indonesia sekitar 60% masih berada di pulau Jawa, sedangkan daerah masih tetap tertinggal.

Kemudian yang mesti diperhatikan pada pertemuan itu ialah bicarakan masalah energi di Indonesia. Dalam pernyataannya Boediono menerangkan bahwa yang dibahas ialah kebijakan pengelolaan energi Indonesia berkaitan program diversifikasi energi yang sedang dijalankan. Lalu pembahasan kondisi pengelolaan energi Indonesia serta hubungannya dengan kondisi energi dunia pada umumnya. Hal ini tentu saja sangat penting untuk dibicarakan terutama erat kaitannya dengan Indonesia yang didorong untuk menjadi negara pengekspor minyak terbesar dan pengintegrasian sistem pengelolaan energi pada sistem global. Perlu diketahui bahwa kuota ekspor energi minyak dan gas Indonesia tahun 2006 paling besar jumlahnya selama kurun waktu 60 tahun, atau sejak negara ini merdeka. Naiknya kuota ekspor ini malah berimbas pada naiknya harga BBM di dalam negeri.

Masalah global ikut dibahas dalam pertemuan itu, yakni menyangkut masalah perkembangan ekonomi 2007, bagaimana peran Amerika, Eropa, Jepang, China dan termasuk masalah seperti *global warming*, dan lain lain. "Mengenai bidang regional, isu yang dibahas antara lain integrasi keuangan di kawasan ini, masalah gerakan modal yang ada plus minusnya, ada masalah ada benefitnya, juga masalah China, mengenai peranan China dalam masalah pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di kawasan ini, maupun dikawasan global termasuk mengenai masalah-masalah fleksibilitas, mengenai *exchange rate* atau sistem kurs itu pengaruhnya. Itu adalah poin-poin yang menjadi pembicaraan Presiden SBY dan De Rato," papar Boediono.

